



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Sumber Daya Manusia Puskesmas, adalah sumber daya manusia UPTD Puskesmas yang terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Jaringan pelayanan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa.
13. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
14. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas yang dikelola oleh petugas kesehatan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disingkat Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan.
16. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
17. Puskesmas non rawat inap adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
18. Bidan Desa adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun di luar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
19. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa atau kelurahan dalam rangka menyediakan atau mendekatkan pelayanan kesehatan dasar (Promotif, Preventif, Kuratif) bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
21. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

22. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
23. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. UPTD Puskesmas Mranggen I;
 - b. UPTD Puskesmas Mranggen II;
 - c. UPTD Puskesmas Mranggen III;
 - d. UPTD Puskesmas Karangawen I;
 - e. UPTD Puskesmas Karangawen II;
 - f. UPTD Puskesmas Guntur I;
 - g. UPTD Puskesmas Guntur II;
 - h. UPTD Puskesmas Sayung I;
 - i. UPTD Puskesmas Sayung II;
 - j. UPTD Puskesmas Karangtengah;
 - k. UPTD Puskesmas Bonang I;
 - l. UPTD Puskesmas Bonang II;
 - m. UPTD Puskesmas Demak I;
 - n. UPTD Puskesmas Demak II;
 - o. UPTD Puskesmas Demak III;
 - p. UPTD Puskesmas Wonosalam I;
 - q. UPTD Puskesmas Wonosalam II;
 - r. UPTD Puskesmas Dempet;
 - s. UPTD Puskesmas Gajah I;
 - t. UPTD Puskesmas Gajah II;
 - u. UPTD Puskesmas Karanganyar I;
 - v. UPTD Puskesmas Karanganyar II;
 - w. UPTD Puskesmas Mijen I;
 - x. UPTD Puskesmas Mijen II
 - y. UPTD Puskesmas Wedung I;
 - z. UPTD Puskesmas Wedung II; dan
 - aa. UPTD Puskesmas Kebonagung.

- (2) Jaringan pelayanan puskesmas pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling; dan
 - c. Bidan Desa.
- (3) Wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang merupakan jabatan struktural eselon IV.b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian Laboratorium, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan merupakan jabatan struktural.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

- e. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
 - f. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - h. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - e. melaksanakan rekam medis;
 - f. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - g. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 9

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Pasal 10

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPTD;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan;
- d. melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait;
- e. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Upaya kesehatan perorangan, Upaya kesehatan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan (PPGD), Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan pada Obstrate Neonatologi (PPGDON), Kejadian Luar Biasa (KLB) dan musibah masal lainnya;
- g. melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- i. bertanggungjawab terhadap pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. melakukan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- k. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- l. evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
- m. bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;
- n. bertanggung jawab atas penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
- p. bertanggung jawab atas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program di Puskesmas;
- q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan UPTD;
- r. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD kepada atasan;
- s. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja serta rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD;
 - b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UPTD;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala UPTD sesuai bidang tugas di Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
 - g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPTD;
 - i. memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dengan baik secara berkesinambungan;
 - j. mengelola manajemen resiko;
 - k. merekap dan menganalisa hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas;
 - l. melaksanakan, merekap, menganalisa dan melaporkan hasil survey kepuasan masyarakat;
 - m. menyajikan hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas dalam rapat tinjauan manajemen;
 - n. merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
 - o. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - p. mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;

- r. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinir pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan rapat tinjauan manajemen.

Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi pelaksanaan beberapa kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinir pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan loket puskesmas;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan umum, pelaksanaan pelayanan medik/asuhan keperawatan, pencatatan pada rekam medik serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan identifikasi, perencanaan, pemecahan masalah dan evaluasi kinerja program pengobatan dasar;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium;
 - e. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen;
 - f. bertanggung jawab terhadap pelayanan pada UGD, pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan UGD, peningkatan mutu pelayanan UGD, pelaporan pelaksanaan gawat darurat secara berkala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas, serta pelaksanaan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani Puskesmas;
 - g. bertanggung jawab terhadap semua pelayanan pada laboratorium meliputi pencatatan data kunjungan pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas dan Jaringannya, pelaporan bulanan, pembuatan laporan tahunan/rekapitulasi sebagai dokumen Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mengoordinasikan program-program di UPTD Puskesmas kepada jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. mengevaluasi capaian program yang ada di jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan memonitoring penyelenggaraan kesehatan di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menyusun laporan dan visualisasi data kegiatan jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala UPTD Puskesmas;
 - f. berpartisipasi aktif dalam pembuatan RUK dan RPK wilayah;
 - g. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di jaringan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Kepala Puskesmas berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala UPTD Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas beserta jajarannya yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas sampai dengan dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 41

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 41 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN DEMAK

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TUGAS DAERAH PUSKESMAS
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN |
|----|------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MRANGGEN | MRANGGEN I | SUMBEREJO |
| | | | KANGKUNG |
| | | | KALITENGAH |
| | | | KEMBANGARUM |
| | | | MRANGGEN |
| | | | BANDUNGREJO |
| | | | BRUMBUNG |
| | | MRANGGEN II | TAMAN SARI |
| | | | MENUR |
| | | | JAMUS |
| | | | WRINGINJAJAR |
| | | | WARU |
| | | | TEGALARUM |
| | | | CANDISARI |
| | | MRANGGEN III | NGEMPLAK |
| | | | KARANGSONO |
| | | | BATUR SARI |
| | | | KEBONBATUR |
| 2. | KARANGAWEN | KARANGAWEN I | BANYUMENENG |
| | | | BRAMBANG |
| | | | PUNDENARUM |
| | | | BUMIREJO |
| | | | KURIPAN |
| | | | SIDOREJO |
| | | KARANGAWEN II | KARANGAWEN |
| | | | TLOGOREJO |
| | | | JRAGUNG |
| | | | WONOSEKAR |
| | | | MARGOHAYU |
| | | | TELUK |
| | | | REJOSARI |
| | | | |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | GUNTUR | GUNTUR I | GUNTUR |
| | | | BOGOSARI |
| | | | TLOGOWERU |
| | | | TEMUROSO |
| | | | BAKALREJO |
| | | | BUMIHARJO |
| | | | TURITEMPEL |
| | | | SIDOHARJO |
| | | | TLOGOREJO |
| | | TRIMULYO | |
| | | GUNTUR II | PAMONGAN |
| | | | BLERONG |
| | | | SUKOREJO |
| | | | SARIREJO |
| | | | SIDOKUMPUL |
| | | | GAJI |
| | | | BANJAREJO |
| | | | WONOREJO |
| | | | KRANDON |
| TANGKIS | | | |
| 4. | SAYUNG | SAYUNG I | SRIWULAN |
| | | | BEDONO |
| | | | PURWOSARI |
| | | | SIDOGEMAH |
| | | | GEMULAK |
| | | | TUGU |
| | | | TIMBUL SLOKO |
| | | | SURODADI |
| | | | SIDOREJO |
| | | BANJARSARI | |
| | | SAYUNG II | JETAKSARI |
| | | | DOMBO |
| | | | BULUSARI |
| | | | PRAMPELAN |
| | | | KARANGASEM |
| | | | KALISARI |
| | | | SAYUNG |
| | | | TAMBAKROTO |
| | | | PILANGSARI |
| LOIRENG | | | |
| 5. | KARANGTENGAH | KARANGTENGAH | SAMPANG |
| | | | KLITIH |
| | | | PIDODO |
| | | | DONOREJO |
| | | | GROGOL |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN |
|----|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | PLOSO |
| | | | PULOSARI |
| | | | KARANGSARI |
| | | | KARANGTOWO |
| | | | DUKUN |
| | | | KEDUNGUTER |
| | | | BATU |
| | | | WONOKERTO |
| | | | WONOWOSO |
| | | | REJOSARI |
| | | | WONOAGUNG |
| | | | TAMBAK BULUSAN |
| 6. | BONANG | BONANG I | TRIDONOREJO |
| | | | GEBANG ARUM |
| | | | GEBANG |
| | | | TROGOBOYO |
| | | | PURWOREJO |
| | | | MARGOLINDUK |
| | | | MORODEMAK |
| | | | SUMBEREJO |
| | | | SUKODONO |
| | | | KEMBANGAN |
| | | | KARANGREJO |
| | | BONANG II | SERANGAN |
| | | | BETAHWALANG |
| | | | PONCOHARJO |
| | | | WEDING |
| | | | JALI |
| | | | WONOSARI |
| | | | JATIMULYO |
| | | | KRAJAN BOGO |
| | | | BONANG REJO |
| | | | JATIROGO |
| 7. | DEMAK | DEMAK I | KADILANGU |
| | | | BETOKAN |
| | | | KALICILIK |
| | | | KARANGMLATI |
| | | | SINGOREJO |
| | | | BINTORO |
| | | DEMAK II | MULYOREJO |
| | | | KEDONDONG |
| | | | RAJI |
| | | | TURIREJO |
| | | | SEDO |
| | | | BOLO |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN |
|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | DEMAK III | BANGO |
| | | | KALIKONDANG |
| | | | KATONSARI |
| | | | DONOROJO |
| | | | MANGUNJIWAN |
| | | | CABEAN |
| 8. | WONOSALAM | WONOSALAM I | TEMPURAN |
| | | | TRENGGULI |
| | | | PILANGREJO |
| | | | BUNDERAN |
| | | | GETAS |
| | | | MOJODEMAK |
| | | | KUNCIR |
| | | | MRISEN |
| | | | KERANG KULON |
| | | | SIDOMULYO |
| | | BOTOREJO | |
| | | MRANAK | |
| | | WONOSALAM II | KARANGREJO |
| | | | JOGOLOYO |
| | | | WONOSALAM |
| | | | KENDALDOYONG |
| | | | LEMPUYANG |
| | | | KARANGROWO |
| | | | TLOGOREJO |
| | | | KALIANYAR |
| DORENG | | | |
| TLOGODOWO | | | |
| 9. | DEMPET | DEMPET | DEMPET |
| | | | BOTOSENGON |
| | | | KEDUNGORI |
| | | | JERUKGULUNG |
| | | | KARANGREJO |
| | | | MERAK |
| | | | BRAKAS |
| | | | KUNIR |
| | | | BALEREJO |
| | | | BALEROMO |
| | | | KUWU |
| | | | KEBONSARI |
| | | | SIDOMULYO |
| | | | GEMPOLDENOK |
| KRAMAT | | | |
| HARJOWINANGUN | | | |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN |
|-----|-------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | KEBONAGUNG | KEBONAGUNG | BABAT |
| | | | KEBONAGUNG |
| | | | KLAMPOK LOR |
| | | | MANGUNAN LOR |
| | | | MANGUNREJO |
| | | | MEGONTEN |
| | | | MIJEN |
| | | | PILANG WETAN |
| | | | PRIGI |
| | | | SARIMULYO |
| | | | SOKO KIDUL |
| | | | SOLOWIRE |
| | | | TLOGOSIH |
| | | | WERDOYO |
| 11. | GAJAH | GAJAH I | SURODADI |
| | | | JATISONO |
| | | | KEDONDONG |
| | | | GEDANGALAS |
| | | | SAMBIROTO |
| | | | BANJARSARI |
| | | | BOYOLALI |
| | | | GAJAH |
| | | | SARI |
| | | TLOGOPANDOGAN | |
| | | GAJAH II | TANJUNGGANYAR |
| | | | WILALUNG |
| | | | MEDHINI |
| | | | MLATIHARJO |
| | | | TAMBIREJO |
| | | | MLEKANG |
| | | | SAMBUNG |
| | | | MOJOSIMO |
| 12. | KARANGANYAR | | KARANGANYAR I |
| | | WONOREJO | |
| | | CANGKRING REMBANG | |
| | | CANGKRING | |
| | | TUWANG | |
| | | UNDAKAN LOR | |
| | | NGEMPLIK | |
| | | KETANJUNG | |
| | | UNDAKAN KIDUL | |
| | | KARANGANYAR II | KEDONGWARU KIDUL |
| | | | BANDUNG REJO |
| | | | KOTAKAN |
| | | | NGALURAN |
| | | | |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN |
|-----|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | JATIREJO |
| | | | WONOKETINGAL |
| | | | KEDUNGWARU LOR |
| | | | TUGU LOR |
| 13. | MIJEN | MIJEN I | NGOLO WETAN |
| | | | GENENG |
| | | | MLATEN |
| | | | BAKUNG |
| | | | TANGGUL |
| | | | BERMI |
| | | | GEMPOL SONGO |
| | | | BENTENG MATI |
| | | | MIJEN |
| | | MIJEN II | PECUK |
| | | | NGEGOT |
| | | | PASIR |
| | | | NGELO KULON |
| | | | REJOSARI |
| | | | JLEPER |
| 14. | WEDUNG | WEDUNG I | WEDUNG |
| | | | NGAWEN |
| | | | NGRUWIT |
| | | | BUKO |
| | | | KENDUREN |
| | | | BERAHAN WETAN |
| | | | BERAHAN KULON |
| | | | BUNGO |
| | | | TEMPEL |
| | | | MANDUNG |
| | | WEDUNG II | KEDUNG MUTIH |
| | | | BABALAN |
| | | | TEDUNAN |
| | | | JETAK |
| | | | JUNGPASIR |
| | | | JUNGSEMI |
| | | | KEDUNG KARANG |
| | | | KENDALASEM |
| | | | MUTIH WETAN |
| | | | MUTIH KULON |

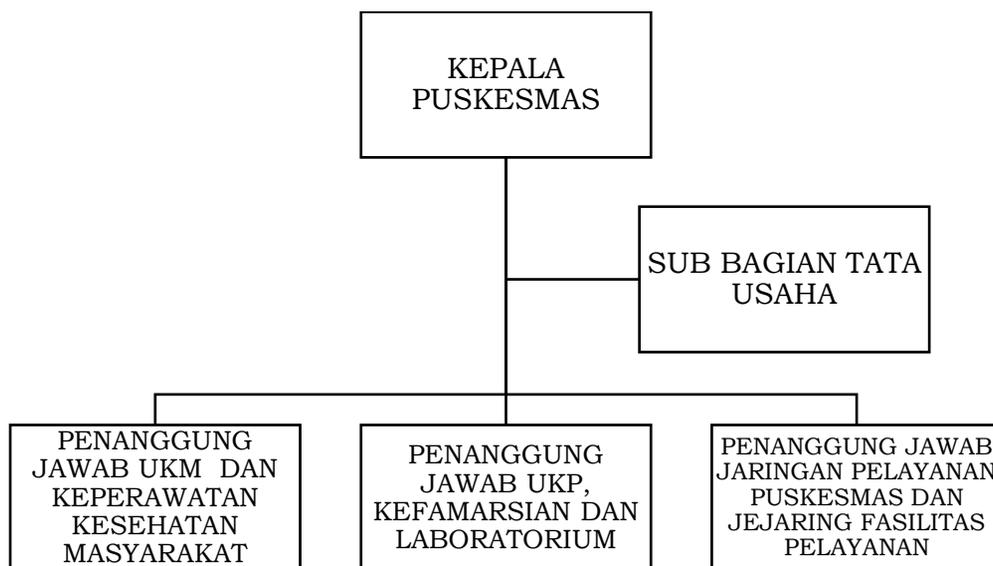
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR